

**PERAN MANAJEMEN BPBD
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pada Program Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin
dan Studi Islam

OLEH :
RIDA PUTRI LIDYA
NIM : 44144008



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**PERAN MANAJEMEN BPBD
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM**

Oleh:

RIDA PUTRI LIDYA

NIM: 44144008

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana (S.1) pada Program Studi
Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN
Sumatera Utara Medan

Medan, 30 juli 2018

Pembimbing I



Dr. Armin Nasution, MA
NIP. 19561217 199103 1 001

Pembimbing II



Drs. Abu Sahrin, M.Ag
NIP. 19671027 200003 1 002

SURAT PERNYATAAN

Kami Pembimbing I dan Pembimbing II yang ditugaskan untuk membimbing Skripsi dari Mahasiswa :

Nama : RIDA PUTRI LIDYA
Nim : 44.14.4.008
Jurusan : PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
Judul Skripsi : PERAN MANAJEMEN BPBD
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG DITINJAU DARI
PERSPEKTIF ISLAM

Berpendapat bahwan skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dapat dimunaqasahkan.

Medan,30 juli 2018

Pembimbing I



Dr. Armin Nasution, MA
NIP. 19561217 199103 1 001

Pembimbing II



Drs. Abu Sahrin, M.Ag
NIP. 19671027 200003 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIDA PUTRI LIDYA
NIM : 44.14.4.008
Jurusan : PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
Tmpt/Tgl.Lahir : Sungai Raya, 12 Mei 1997
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi
Islam UIN Sumatera Utara Medan
Alamat : Jl. Ir.H. Juanda Desa. Tanjung Karang
Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul
**“PERAN MANAJEMEN BPBD
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG DITINJAU DARI
PERSPEKTIF ISLAM”** benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-
kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka
kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab
saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan,

Yang membuat pernyataan



RIDA PUTRI LIDYA

44.14.4.008

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peran Manajemen BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Aceh Tamiang Ditinjau Dari Perspektif Islam.”

Nama : Rida Putri Lidya NIM : 44144008 Prodi : Pemikiran Politik Islam
telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Muanaqasyah Sarjana
(S.1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam pada tanggal 10 Agustus 2018.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S.1)
pada Program Studi Pemikiran Politik Islam.

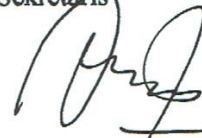
Medan, 21 Januari 2019
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Sarjana (S.1) FUSI UIN
Sumatera Utara

Ketua



Drs. Abdul Halim, MA
NIP. 19630731 200003 1 001

Sekretaris



Agusman Damanik, MA
NIP. 197608201411 1 001

Anggota Penguji



1. Dr. Armin Nasution, MA
NIP. 19561217 199103 1 001



2. Drs. Abu Syahrin, M.Ag
NIP. 19671027 200003 1 002



3. Dr. H. Arifin Syah, M. Ag
NIP. 19680909 199403 1 004



4. Drs. Mhd. Aswin, MAP
NIP. 19680817 200312 1 003

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN-SU



Prof. Dr. Katimin, M.Ag
NIP. 19650705 199303 1 003

ABSTRAK



Nama : RIDA PUTRI LIDYA
Nim : 44144008
Prodi : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Fakultas Ushuluddin dan
Studi Islam
Alamat : Jl.Ir.H. Juanda Kec Karang Baru
Kab Aceh Tamiang
Judul : **Peran Manajemen BPBD
Dalam Penanggulangan Bencana
Banjir di Kab Aceh Tamiang
Ditinjau dari perspektif Islam**

Bencana diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan masyarakat. Peristiwa tersebut terjadi baik dari faktor alam maupun faktor manusia. Bencana tersebut mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk itu penulis membahas peran BPBD dalam penanggulangan banjir di Kab Aceh Tamiang ditinjau dari perspektif Islam.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana peran manajemen BPBD dalam penanggulangan banjir di Kab Aceh Tamiang ditinjau dari perspektif Islam. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran manajemen BPBD dalam penanggulangan banjir di Kab Aceh Tamiang ditinjau dari perspektif Islam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berupa lapangan (*field research*).

Secara umum penyebab terjadinya bencana banjir adalah karena tingginya curah hujan sehingga saluran atau sungai tidak mampu menampung debit air yang dihasilkan hujan tersebut. Peran BPBD dalam penanggulangan banjir ialah melakukan pencegahan sebelum banjir (*prevention*), penanganan saat banjir (*response/intervention*), dan pemulihan setelah banjir (*recovery*). Dalam penanggulangan bencana banjir, ada beberapa hambatan yang dialami BPBD kab Aceh Tamiang diantaranya: kurangnya koordinasi, kurang tersosialisasinya tata cara pemberian bantuan, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya SDM.

Islam mengajarkan sikap proaktif dari pada hanya reaktif. Alih-alih menunggu bencana terjadi, penekanan diberikan pada pemikiran bagaimana nanti kalau bencana terjadi. Dengan demikian kita dapat mengambil langkah-langkah nyata sebelum sebuah bencana terjadi. Di dalam Islam sendiri diajarkan untuk saling tolong menolong antara manusia dengan manusia lainnya, yang ada tertulis dalam Q.S Al-Maidah ayat 2. Hal ini sama seperti apa yang diterapkan oleh BPBD Kab Aceh Tamiang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul: “Peran Manajemen BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Aceh Tamiang Ditinjau Dari Perspektif Islam”

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis banyak berharap mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya, untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Terimakasih yang tak terhingga, pertama kali kepada ibunda tercinta Kamaliah, dan ayahanda tercinta Alm.H.Ridwan SE, yang merupakan kebanggaan hati penulis telah memberikan segala apa yang mereka miliki demi kemajuan anaknya. Kedua orang tua yang telahbersusahpayah, mengasuh, mendidik, dan membiayai, mendoakanpenulissejak kecil hinggaakhirperkuliahanini. Namunhanyabakti dan doa yang mampuadindaberikansemogaayahanda dan ibundadiberikankesehatan dan diberirezeki yang murahsertabahagia dunia akhirat amin, sertatelahmemberikanmotivasisehinggapenulisdapatmenyelesaikanskripsid enganbaik.
2. Bapak Dr.Armin Nasution, MA selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Abu Sahrin, M.Ag selaku pembimbing II. Terimakasih atas segala bimbingan,ajaran dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan dari selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan masing-masing dalam pekerjaan maupun pendidikan, masih bersedia untuk membimbing dan

menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini . Terimakasih dan mohon maaf bila ada kesalahan yang penulis lakukan.

3. Bapak Prof. Dr. H. Katimin, M.AgselakuDekanFakultasUshuluddin dan Studi Islam besertajajarannya, Bapak Drs. Muhammad Aswin, M.Ap selaku ketua jurusan studi Pemikiran Politik Islam, Bapak/Ibu dosen di lingkungan civitas akademik FakultasUshuluddin dan Studi Islam UIN SU.
4. Bapak Prof. Dr.K.H Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor UIN SU beserta seluruh jajarannya.
5. Bapak Mix Donal, SH selaku Kepala Badan BPBD Kab.Aceh Tamiang beserta jajarannya.
6. Special thanks for M.Ridho Syahputra Saragih, atas dukungan dorongan,bantuan,semangat,perhatian serta kepedulian kepada penulis dari awal penyusunan hingga akhir penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Adik-adikku : Rizky Maulina,Nazla Farhan dan Salsabila Nadhifa Terimah kasih atas segala semangat kalian sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku: Dwi Wahyuningsih, Mardiana, Agung Aditama, Sehatman Al-Akbar Hasibuan, Tomy Supratama Solin. Terimakasih atas dorongan semangat dan kebersamaan kita yang takkan terlupakan.
9. sahabat LDRku Masruraini dwi ersya putri, Terimakasih banyak yang telah menghibur dan bersedia untuk mendengarkan keluh kesah cerita penulis hingga selesainya penyusunan skripsi.
10. Seluruh teman-teman seangkatan di Pemikiran Politik Islam: Addinul Huda Daulay, Evy Ermylayanti, Harja Wardoyo, Ida Royani Siregar, Ikhsan Faisal Angkat, Mardiana, Maulida, M. Muiz Wiramunte, Muklis Hasibuan, Nurul Qamariah, Rahmi Wardah hasibuan, Reni Andriani, Agung Aditama, Sari Fatimah Azzahra M, Sehatman Al-Akbar Hasibuan, Tanwirul Manar, Tomy Supratama Solin, Yayank Dwi Utari, Yudhitya Sasmita. Terimakasih atas suka duka dan dukungan moral dari kalian semua.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang akan dikerjakan selanjutnya bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Medan, 30 juli 2018



RIDA PUTRI LIDYA

NIM : 44.14.4.008

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN

SURAT PERNYATAAN

SURAT PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LatarBelakangMasalah..... 1

B. RumusanMasalah 6

C. Tujuan dan KegunaanPenelitian 6

D. Batasan Istilah..... 7

E. Kajian Terdahulu 9

F. SistematikaPembahasan 11

BAB II LANDASAN TEORI 12

A. Profil BPBD Kab Aceh Tamiang..... 12

1. Sejarah..... 12

2. VisiMisi 16

3. StrukturOrganisasi 16

4. Tugas pokok dan fungsi..... 18

B. PenanggulanganBencana.....	24
C. PengertianBanjir	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. InformanPenelitian	32
C. Jenis dan Sumber Data	33
D. Instrumen Pengumpul Data.....	34
E. Teknik Analisa Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. GambaranUmumLokasiPenelitian.....	40
B. PeranBPBD TerhadapPenanggulanganBanjir di Kabupaten Aceh Tamiang.....	47
C. Hambatan BPBD dalamPenanggulanganBanjir di Kabupaten Aceh Tamiang.....	55
D. Pandangan Islam terhadap BPBD dalamMenanggulangiBanjir di Kabupaten Aceh Tamiang.....	58
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi bencana. Sering kali bencana di tanggap secara persial oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya di tanggap dengan pendekatan tanggap darurat (*emergency respons*). Kurang adanya kebijakan pemerintah yang integral dan kurangnya koordinasi antar elemen dianggap sebagai beberapa penyebab yang memungkinkan hal itu dapat terjadi.

Pola penaggulangan bencana mendapat dimensi baru dengan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penaggulangan Bencana (PerkaBNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.¹

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dalam bagian dua tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah pasal 19 ayat 1 menyatakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdiri atas unsur; pengarah penanggulangan bencana dan pelaksana penanggulangan bencana.

¹Undang-undang Republik Indonesia, *Tentang Penanggulangan Bencana* (UUD, 2004)

Pada pasal 20 dijelaskan tentang fungsi dari BPBD yaitu:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan bencana secara terpadu, terencana dan menyeluruh.

Berdasarkan Pasal 21 dijelaskan tentang tugas dari BPBD antara lain:

1. Menetapkan pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan badan nasional penanggulangan bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata.
2. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

Secara umum kegiatan manajemen bencana dapat dibagi kedalam tiga kegiatan utama, yaitu:

1. Kegiatan prabencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini.
2. Kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan *Search And Rescue* (SAR), bantuan darurat dan pengungsian dan
3. Kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Dimensi baru dari rangkaian manajemen penanggulangan bencana tersebut adalah:

1. Penanggulangan bencana sebagai sebuah upaya menyeluruh dan pro aktif dari pengurangan resiko bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. Penanggulangan bencana sebagai upaya yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi.
3. Penanggulangan bencana sebagai bagian dari proses pembangunan sehingga mewujudkan ketahanan(*resilience*) terhadap bencana (Bappenas, 2009).

Oleh karenanya, upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu di sesuaikan dengan kondisi daerah. Operasi penanggulangan bencana secara nasional harus dipastikan berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan. Untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi, dan operasi secara nasional mencakup pemerintah pusat dan daerah maka perlu dimulai dengan mengetahui sejauh mana penerapan peraturan terkait dengan penanggulangan bencana di daerah.²

Berdasarkan angka kejadian bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2017 yang terdiri dari beberapa kecamatan terendam banjir. Jumlah

²HeniPancawati, *ManajemenBencana (Disaster Manajemen)*, (Purwokerto.KOMPLEET (Materi Seminar, 2006), hlm 76.

pengungsi seluruhnya mencapai Ratusan jiwa. (*Arsip BPBD ACEH TAMIANG*). Berdasarkan hasil observasi di wilayah pasca bencana Kabupaten Aceh Tamiang di peroleh beberapa permasalahan yang menyangkut dengan manajemen penanggulangan bencana yang dilakukan BPBD Kabupaten Aceh Tamiang yaitu perencanaan penanggulangan bencana yang belum optimal, sosialisasi yang tidak berjalan dengan baik serta, pengaturan personalia (pegawai) yang belum tepat serta kurangnya pengawasan pada saat terjadi bencana. Hal ini dikarenakan BPBD Kabupaten Aceh Tamiang merupakan badan yang baru di bentuk dan kurang nya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi bencana, serta pegawai BPBD kurang pengalaman dalam bidang kebencanaan.

Manusia sebagai penyebab timbulnya musibah digambarkan dengan beberapa istilah di dalam Alquran seperti: karena tangan manusia, karena kezhaliman yang mereka lakukan, karena keengkarannya mereka atau dosa yang mereka lakukan, sehingga semuanya itu terjadi sebagai hukuman atas apa yang telah mereka perbuat, baik secara langsung maupun tidak. Ini seperti yang ditegaskan oleh firman Allah berikut:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍۭ

Artinya : “Dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (darikesalahan-kesalahanmu).” (QS. al-Syura : 30)³

³Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, (Diponegoro, Bandung, 2010). hlm.231

Selama ini di Kabupaten Aceh Tamiang ketika terjadi bencana alam khususnya banjir yang sering melanda kecamatan-kecamatan penanganan dari pihak dinas atau pemerintah daerah khususnya penanggulangan bencana daerah (BPBD) sebagai organisasi perangkat daerah dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana sebagai badan tanggap darurat Kabupaten Aceh Tamiang selalu datang terlambat, keterlambatan kinerja mereka membuat masyarakat yang terkena banjir lebih menderita. Dimana seharusnya BPBD biasakan lebih cepat dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Tamiang sehingga dapat meringankan beban masyarakat korban banjir.

Sedangkan dalam perkara menolong sesama manusia, Islam mengutamakan untuk segera mungkin melaksanakannya. Hal itu tertera dalam firman Allah SWT dalam QS Al- Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*⁴

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “*Peran Manajemen BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Tamiang Ditinjau dari Perspektif Islam*”.

⁴Departemen Agama, hlm.156

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran manajemen BPBD saat penanggulangan pra bencana, bencana, dan pascabencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Apa hambatan yang dihadapi BPBD saat proses penanggulangan pra bencana, bencana, dan pasca bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan BPBD di Kab Aceh Tamiang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Bagaimana peran manajemen BPBD saat penanggulangan prabencana, bencana, dan pasca bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana hambatan yang dihadapi BPBD saat proses penanggulangan pra bencana, bencana, dan pasca bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap penanggulangan bencana yang dilakukan BPBD di Kab Aceh Tamiang

Adapun manfaat yang diharap dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti, dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah di peroleh di bangku perkuliahan

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau informasi tentang kinerja badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir bagi para akademisi, maupun sebagai bahan perbandingan bagi para peneliti yang hendak melakukan penelitian lanjutan di masa mendatang.

D. Batasan Istilah

Dari judul di atas, ada beberapa istilah yang perlu di batasi pengertiannya agar istilah yang dipergunakan dalam judul tersebut menjadi jelas dan tidak memberikan salah pengertian maupun tafsiran ganda, istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peran merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya.
2. Manajemen merupakan suatu yang sangat penting dalam organisasi, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat dalam pengelolaan dan pengorganisasian kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan dilakukan untuk menunjang keberhasilan program-program yang direncanakan tersebut..⁵
3. Penanggulangan Bencana dan Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah merupakan unsur pendukung dan pelaksana tugas dalam penyelenggaraan

⁵HandokoT. Hani, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2009), hlm.54

pemerintahan dibidang penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat terhadap bencana alam, non alam dan sosial. Penanggulangan bencana adalah segala upaya kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan (mitigasi), penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi, baik sebelum bencana, pada saat terjadinya bencana maupun setelah bencana dan menghindarkan dari bencana yang terjadi.⁶

4. Bencana merupakan kejadian yang mendadak atau tidak diperkirakan yang mengakibatkan rumah sakit dan sarana masyarakat lainnya mengalami kerusakan serta fungsinya terganggu. Peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.⁷
5. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Pengarahan banjir Uni Eropa mengartikan banjir sebagai perendaman sementara oleh air pada daratan yang biasanya tidak terendam air. Dalam arti “air mengalir” , kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut. Banjir di akibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar atau meluap.⁸
6. Perspektif adalah sudut pandang; pandangan.⁹ Secara umum merujuk pada suatu perangkat nilai, perangkat gagasan, kerangka konseptual dan perangkat

⁶*Ibid*56.

⁷Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.42.

⁸*Ibid*43.

⁹Dewan Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Ibid*, h. 878.

asumsi yang berpengaruh terhadap persepsi seseorang sehingga akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang yang berada dalam kondisi tertentu.

E. Kajian Terdahulu

Dari literatur-literatur yang ada, tampaknya kajian tentang peran BPBD telah banyak dilakukan, baik mengenai kinerja, pengaruh, maupun aspek lainnya.

Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Marwiyanthi (2013) yang berjudul "*Peran BPBD Dalam tahap Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Alam di Kabupaten Karanganyar*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BPBD Kabupaten Karanganyar dalam tahap kesiapsiagaan penanganan bencana alam melalui kegiatan Pencegahan dan Mitigasi. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan BPBD Kabupaten Karanganyar untuk menghilangkan dan mengurangi ancaman bencana dengan cara Pengurangan Resiko Bencana yaitu pelibatan stakeholder, manajemen resiko bencana, dan strategi pengurangan resiko bencana. Sedangkan Mitigasi adalah upaya yang dilakukan BPBD Kabupaten Karanganyar untuk mengurangi resiko bencana dengan pembangunan fisik dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran BPBD Kabupaten Karanganyar adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tahap kesiapsiagaan penanganan bencana alam. Upaya yang perlu dilakukan baik mitigasi pasif berupa pendidikan sadar bencana, penyuluhan tentang bencana alam serta karakteristiknya. Dengan upaya-upaya yang dilakukan BPBD Kabupaten Karanganyar dimungkinkan dapat mengurangi dampak bencana dan juga meminimalisir korban akibat bencana alam. Dibutuhkan peran aktif BPBD dalam

tahapan kesiapsiagaan ini diharapkan mampu meningkatkan warga masyarakat selalu aktif dalam memperoleh informasi mengenai bencana alam.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Utami (2010) yang berjudul "*Kasus Penanggulangan Banjir Kota Bandar Lampung Tahun 2010*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung dilakukan melalui tiga tahap kegiatan yaitu Pra bencana, upaya yang dilakukan identifikasi daerah rawan bencana, pemetaan jalur evakuasi bencana, dan pendidikan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Saat tanggap darurat atau saat terjadi bencana, upaya yang dilakukan pengerahan Tim Reaksi Cepat (TRC), penyelamatan dan evakuasi korban, perlindungan kelompok rentan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Pasca bencana, upaya yang dilakukan rekonstruksi serta rehabilitasi, selanjutnya terdapat beberapa tindakan yang belum terlaksana yaitu mengenai sistem penyelamatan diri ke jalur evakuasi bencana yang telah dipersiapkan, yang berakibat kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai jalur-jalur evakuasi yang ada. Serta pendidikan informal kebencanaan yang hanya dikalangan Satgas penanggulangan bencana, tidak mengikutsertakan masyarakat di dalam pendidikan kebencanaan tersebut. Kendala-kendala yang menghambat jalannya penanggulangan bencana yang dialami BPBD Kota Bandar Lampung yaitu kurangnya sosialisasi dan informasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat dalam segala tindakan atau kegiatan penanggulangan bencana oleh BPBD Kota Bandar Lampung, kurangnya alokasi dana untuk melaksanakan penanggulangan bencana dan kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan tindakan atau kegiatan kebencanaan.

Dari penelitian di atas yang telah diuraikan, maka terdapat perbedaan dengan penelitian ini, penelitian ini berfokus pada peran manajemen BPBD terhadap penanggulangan bencana banjir di Kab Aceh Tamiang.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini nantinya akan disajikan ke dalam V (lima) bab. Setiap bab akan dibagi kepada beberapa sub bab yang memiliki kesinambungan agar pembahasan lebih sistematis. Untuk lebih jelas, sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Batasan istilah, Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, Kajian terdahulu, Sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, terdiri dari: Profil BPBD Kab Aceh Tamiang, Penanggulangan Bencana, Banjir.

Bab III Metodologi Penelitian, terdiri dari: Jenis Penelitian, Informan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Instrumen Pengumpul Data, dan Teknik Analisa Data .

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari: Gambaran umum lokasi penelitian, Peran manajemen BPBD terhadap bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Hambatan BPBD dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Tantangan dan peluang, Pandangan Islam terhadap BPBD dalam menanggulangi banjir di Kabupaten Aceh Tamiang.

Bab V Penutup, terdiri dari: Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Profil BPBD Kabupaten Aceh Tamiang

1. Sejarah

Sejarah lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terbentuk tidak terlepas dari perkembangan penanggulangan bencana pada masa kemerdekaan hingga bencana alam berupa gempa bumi dahsyat di Samudera Hindia pada abad 20.¹⁰ Sementara itu, perkembangan tersebut sangat dipengaruhi pada konteks situasi, cakupan dan paradigma penanggulangan bencana. Melihat kenyataan saat ini, berbagai bencana yang dilatarbelakangi kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis mendorong Indonesia untuk membangun visi untuk membangun ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana

Wilayah Indonesia merupakan gugusan kepulauan terbesar di dunia. Wilayah yang juga terletak di antara benua Asia dan Australia dan Lautan Hindia dan Pasifik ini memiliki 17.508 pulau. Meskipun tersimpan kekayaan alam dan keindahan pulau-pulau yang luar biasa, bangsa Indonesia perlu menyadari bahwa wilayah Indonesia memiliki 129 gunung api aktif, atau dikenal dengan *ring of fire*, serta terletak berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia yaitu Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik.¹¹

Menghadapi ancaman bencana tersebut, Pemerintah Indonesia berperan penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana di tanah air.

¹⁰<http://www.bnpb.go.id/page/read/1/sejarah> diakses pada 17 Juni 2018 Pukul 12:54 WIB.

¹¹<http://www.bnpb.go.id>, *Ibid*

Pembentukan lembaga merupakan salah satu bagian dari sistem yang telah berproses dari waktu ke waktu. Lembaga ini telah hadir sejak kemerdekaan dideklarasikan pada tahun 1945 dan perkembangan lembaga penyelenggara penanggulangan bencana dapat terbagi berdasarkan periode waktu sebagai berikut:

a) Periode 1945-1966

Pemerintah Indonesia membentuk Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Badan yang didirikan pada 20 Agustus 1945 ini berfokus pada kondisi situasi perang pasca kemerdekaan Indonesia. Badan ini bertugas untuk menolong para korban perang dan keluarga korban selama perang kemerdekaan.

b) Periode 1966-1967

Pemerintah membentuk Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat (BP2BAP) melalui Keputusan Presiden Nomor 256 Tahun 1966. Penanggung jawab untuk lembaga ini adalah Menteri Sosial. Aktivitas BP2BAP berperan pada penanggulangan tanggap darurat dan bantuan korban bencana. Melalui keputusan ini, paradigma penanggulangan bencana berkembang tidak hanya berfokus pada bencana yang disebabkan manusia tetapi juga bencana alam.

c) Periode 1967-1979

Frekuensi kejadian bencana alam terus meningkat. Penanganan bencana secara serius dan terkoordinasi sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pada tahun 1967 Presidium Kabinet mengeluarkan Keputusan Nomor 14/U/KEP/I/1967 yang bertujuan untuk membentuk Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (TKP2BA).¹²

¹²<http://www.bnpb.go.id>, *Ibid*

d) Periode 1979-1990

Pada periode ini Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (TKP2BA) ditingkatkan menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (Bakornas PBA) yang diketuai oleh Menkokesra dan dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1979. Aktivitas manajemen bencana mencakup pada tahap pencegahan, penanganan darurat, dan rehabilitasi. Sebagai penjabaran operasional dari Keputusan Presiden tersebut, Menteri Dalam Negeri dengan instruksi Nomor 27 tahun 1979 membentuk Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam (Satkorlak PBA) untuk setiap provinsi.

e) Periode 1990-2000

Bencana tidak hanya disebabkan karena alam tetapi juga non alam serta sosial. Bencana non alam seperti kecelakaan transportasi, kegagalan teknologi, dan konflik sosial mewarnai pemikiran penanggulangan bencana pada periode ini. Hal tersebut yang melatarbelakangi penyempurnaan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB). Melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990, lingkup tugas dari Bakornas PB diperluas dan tidak hanya berfokus pada bencana alam tetapi juga non alam dan sosial. Hal ini ditegaskan kembali dengan Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999. Penanggulangan bencana memerlukan penanganan lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas disiplin yang terkoordinasi.

f) Periode 2001-2005

Indonesia mengalami krisis multidimensi sebelum periode ini. Bencana sosial yang terjadi di beberapa tempat kemudian memunculkan permasalahan baru. Permasalahan tersebut membutuhkan penanganan khusus karena terkait dengan pengungsian. Oleh karena itu, Bakornas PB kemudian dikembangkan menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP). Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden No.111 Tahun2001.

g) Periode 2005-2008

Tragedi gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan sekitarnya pada tahun 2004 telah mendorong perhatian serius Pemerintah Indonesia dan dunia internasional dalam manajemen penanggulangan bencana. Menindaklanjuti situasi saat itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB). Badan ini memiliki fungsi koordinasi yang didukung oleh pelaksana harian sebagai unsur pelaksana penanggulanagn bencana. Sejalan dengan itu, pendekatan paradigma pengurangan resiko bencana menjadi perhatian utama.

h) Tahun 2008

Dalam merespon sistem penanggulangan bencana saat itu, Pemerintah Indonesia sangat serius membangun legalisasi, lembaga, maupun budgeting. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB terdiri atas

kepala, unsur pengarah penanggulangan bencana, dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. BNPB memiliki fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Metamorfosa terbentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari tahun 1945 sampai sekarang.¹³

2. Visi misi

Visi: “Terwujudnya Masyarakat Aceh Tamiang yang Tangguh Menghadapi Bencana”. Sedangkan Misi dari BPBD Kabupaten Aceh Tamiang yaitu:

- a) Melindungi masyarakat kabupaten Aceh Tamiang dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana.
- b) Meningkatkan SDM dan penguatan kelembagaan penanggulangan bencana.
- c) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan penanggulangan bencana.¹⁴

3. Struktur organisasi



Merujuk pada Qanun Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 20); dan peraturan

Bupati Aceh Tamiang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan

¹³ *Ibid*

¹⁴ Sumber dari kantor BPBD Kab Aceh Tamiang/ 2-07-2018/pukul 13.23

Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Berikut struktur organisasi dai BPBD Kab Aceh Tamiang.¹⁵ Adapun struktur organisasinya sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Aceh Tamiang.
- b. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Aceh Tamiang.
- c. Kepala Sekretariat, terdiri dari:
 - i. Sub Bagian Umum;
 - ii. Sub Bagian Keuangan;
 - iii. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
 - i. Seksi Pencegahan;
 - ii. Seksi Kesiapsiagaan;
- e. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 - i. Seksi Kedaruratan;
 - ii. Seksi Logistik;
- f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 - i. Seksi Rehabilitasi;
 - ii. Seksi Rekonstruksi.

¹⁵ Sumber: Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2010 , *Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang*

4. Tugas pokok dan fungsi

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Tamiang¹⁶ adalah sebagai berikut :

Kepala Pelaksana mempunyai tugas:

- a) memimpin dan membina Badan dalam pelaksanaan tugas secara operasional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b) menyiapkan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana;
- c) menetapkan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah; dan
- d) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga lainnya di bidang penanggulangan bencana.

Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaan Badan;
- b) pelaksanaan pengendalian penyusunan program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- c) pelaksanaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Aceh Tamiang;

¹⁶Sumber: Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2010 ,*Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.*

- d) pelaksanaan pengendalian pengelolaan data dan informasi di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Aceh Tamiang;
- e) pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan program kerja di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Aceh Tamiang;
- f) pelaksanaan pengendalian, pemantauan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Aceh Tamiang;
- g) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Aceh Tamiang; dan
- h) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan Kepala BPBD sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis, program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, pembinaan dan pelayanan administrasi, kepegawaian, penataan arsip, dokumentasi, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, aset, perlengkapan, rumah tangga, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan.

Kepala Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b) pengkoordinasian penyusunan anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
- c) pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
- d) pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- e) fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- f) pengkoordinasian penyajian data dan informasi kebencanaan di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang;
- g) pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana, laporan akuntabilitas kinerja, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- h) pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- i) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
- j) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada saat prabencana serta pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana dan mencegah ancaman serta mengurangi kerentanan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a) perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal;
- b) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana;
- c) pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- d) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan,

pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital;
- b) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital;
- c) pelaksanaan fungsi komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d) pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital;

- e) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kedaruratan dan logistik; dan
- f) pelaksanaantugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a) perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c) pelaksanaan penyusunan program/perencanaan teknis, pengelolaan data dan pengawasan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- d) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- e) pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan publik, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana;

- f) pengkoordinasian kegiatan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan publik, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana;
- g) pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana umum pasca bencana;
- h) pengkoordinasian dan pelaksanaan perencanaan teknis kegiatan relokasi; dan
- i) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.¹⁷

B. Penanggulangan Bencana

Kata Penanggulangan Bencana jika dilihat dari etimologi berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yakni *disaster management* (manajemen bencana). Berdasarkan kata diatas, dapat dilihat bahwa penanggulangan dapat diartikan sebagai manajemen. Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁸

Pengertian lain dari manajemen adalah sebagai suatu proses, yakni sebagai suatu rangkaian tindakan, kegiatan, atau operasi yang mengarah kepada beberapa sasaran tertentu.

¹⁷Sumber: Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2010

¹⁸ DS Iyong, *Prosedur Tanggap Darurat Bencana*, Edisi I, (Jakarta: PMI, 2007), hlm. 7

Dari beberapa pendapat mengenai manajemen diatas, mengartikan bahwa manajemen merupakan sebuah pemikiran dan tindakan yang dilakukan secara rutin untuk mencapai tujuan tertentu. Maka, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan merupakan suatu pemikiran dan tindakan dengan beberapa proses yang dilakukan secara rutin untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah adanya koordinasi sehingga dapat disimpulkan koordinasi sangat berhubungan dengan penanggulangan bencana melalui tahapan-tahapan yang dilakukan pada sebelum, saat dan sesudah bencana.¹⁹

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan/atau manusia, yang mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerugian harta benda, kerusakan sarana atau prasarana, lingkungan, utilitas umum, hilangnya sumber-sumber kehidupan, serta hilangnya akses terhadap sumber kehidupan. Bencana itu dapat berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung merapi, angin topan dan badai, banjir, tanah longsor,kekeringan, kebakaran hutan, serangan hama tanaman atau penyakit hewan, epidemi, pendemi atau kejadian luar biasa, kecelakaan transportasi, kegagalan teknologi, pencemaran lingkungan, dan kerusakan sosial.²⁰

Bencana adalah suatau gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri¹⁶.

¹⁹Heni Pancawati, *Manajemen Bencana (Disaster Managemen)*, (Purwokerto: KOMPLEET 2006) (Materi Seminar), hlm, 76

²⁰Syamsul Maarif, *Bencana dan Penanggulangannya Tinjauan dari Aspek Sosiologis*. Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana 2010, 1 (4), hlm, 4.

Dalam Undang-Undang No.24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik dari faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

C. Banjir

1. Pengertian banjir

Banjir adalah debit air yang melebihi besar kapasitas pengaliran air tertentu. Peristiwa banjir karena limpahan air banjir dari sungai karena debit banjir tidak mampu dialirkan oleh alur sungai atau debit banjir lebih besar dari kapasitas pengaliran sungai yang ada. Peristiwa banjir sendiri tidak menjadi permasalahan apabila tidak mengganggu manusia melakukan kegiatan pada daerah dataran banjir.²¹ Maka perlu adanya pengaturan daerah daratan banjir untuk mengurangi kerugian akibat banjir

2. Ciri-ciri banjir

Bencana banjir memiliki ciri-ciri dan akibat sebagai berikut.

- a) Banjir biasanya terjadi saat hujan deras yang turun terus menerus sepanjang hari.
- b) Air menggenangi tempat-tempat tertentu dengan ketinggian tertentu.
- c) Banjir dapat mengakibatkan hanyutnya rumah-rumah, tanaman, hewan, dan manusia.

²¹ Kodoatie, Robert J. Dan Sugiyanto, *Banjir*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar 2002), hlm. 78-79.

- d) Banjir mengikis permukaan tanah sehingga terjadi endapan tanah di tempat-tempat yang rendah.
- e) Banjir dapat mendangkalkan sungai, kolam, atau danau.
- f) Sesudah banjir, lingkungan menjadi kotor oleh endapan tanah dan sampah.
- g) Banjir dapat menyebabkan korban jiwa, luka berat, luka ringan, atau hilangnya orang.
- h) Banjir dapat menyebabkan kerugian yang besar baik secara moril maupun materil.²²

3. Penyebab banjir

Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (natural disaster) maupun oleh ulah manusia (man-made disaster). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana antara lain:

- a. Bahaya alam (*natural hazards*) dan bahaya karena ulah manusia (*man-made hazards*) yang menurut *United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR)* dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (*geological hazards*), bahaya hidrometeorologi (*hydrometeorological hazards*), bahaya biologi (*biological hazards*), bahaya teknologi (*technological hazards*) dan penurunan kualitas lingkungan (*environmental degradation*)
- b. Kerentanan (*vulnerability*) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/ kawasan yang berisiko bencana
- c. Kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat.

²²Kodoatie, Robert J. Dan Sugiyanto, *Banjir, Ibid*, hlm. 78-79.

Hujan muson dapat mengakibatkan banjir besar di negara-negara yang terletak di dekat khatulistiwa seperti Bangladesh, karena panjangnya musim hujan di sana. Badai juga dapat menyebabkan banjir melalui beberapa cara, diantaranya melalau ombak besar yang tingginya bisa mencapai 8 meter. Mata badai mempunyai tekanan yang sangat rendah, jadi ketinggian laut dapat naik beberapa meter pada mata guntur. Banjir pesisir seperti ini sering terjadi di Bangladesh.

Gempa bumi dasar laut maupun letusan pulau gunung berapi yang membentuk kawah (seperti Thera atau Krakatau) dapat memicu terjadinya gelombang besar yang disebut tsunami yang menyebabkan banjir pada daerah pesisir pantai.

Selain hal-hal diatas, dapat dilihat di tabel penyebab dan pencegahan terjadinya banjir adalah sebagai berikut.

Tabel I

Penyebab dan Pencegahan Banjir

Penyebab Banjir	Pencegahan Banjir
1. Curah hujan tinggi	1. Mengenalitempat tinggal
2. Saluran air sungai tidak mampu menampung sehingga air meluap	2. Tidak membuang sampah disaluran air
3. Penyumbatan alran air	3. Menjaga kelestarian hutan atau daerah resapan air
4. Rusaknya hutan	4. Membersihkan saluran air

Secara umum penyebab terjadinya bencana banjir adalah karena tingginya curah hujan sehingga saluran atau sungai tidak mampu menampung debit air yang dihasilkan hujan tersebut. Kapasitas penampungan sungai maupun saluran tersebut dapat berubah atau mengecil akibat adanya sedimentasi, sumbatan sampah, maupun longSORAN dinding saluran. Hal lain yang menimbulkan besarnya aliran air hujan adalah adanya penggundulan hutan (*illegal logging*), karena daerah hutan yang seharusnya menjadi daerah resapan air kapasitasnya menjadi berkurang dan akan hilang sehingga air hujan dapat mengalir bebas tanpa hambatan ke daerah di hilirnya. Berkurangnya daerah resapan di daerah permukiman juga merupakan pemicu terjadinya banjir. Air hujan yang seharusnya dapat meresap ke dalam tanah atau terhambat aliran *run off* nya keseluruhannya akan mengalir langsung ke dalam saluran drainase sehingga beban saluran melebihi kapasitasnya. Akibatnya terjadi luapan air ke daerah sekitarnya.²³

4. Dampak dari banjir

Dilihat dari banyaknya informasi-informasi baik berupa berita maupun papan iklan yang selalu memberikan motifasi dan saran agar masyarakat memperhatikan lingkunganhidup, namun tetap saja hal tersebut tidak membuat masyarakat menjadi sadar padahal dampak banjir itu dirasakan oleh masyarakat sendiri. Adapun beberapa dampak penyebab banjir, diantaranya yaitu:

- a) Meluapnya air di sungai

Rusaknya lingkungan alam baik diperkotaan dan pedesaan merupakan salah satu penyebabnya. Kurangnya perhatian masyarakat tentang lingkungan hidup

²³ Kodoatie, Robert J. Dan Sugiyanto. *Ibid*, hlm. 78-79.

membuat bencana ini sulit untuk dihilangkan. Sampah yang dibuang secara sembarangan ke sungai merupakan salah satu penyebab utama banjir.

b) Area hutan yang semakin gundul

Melakukan penebangan hutan secara sembarangan tanpa memikirkan bagaimana kedepannya, apabila hujan deras yang turun akan membawa air yang melimpah, bila hujan tidak mampu menyerap air hujan ini maka akan menjadi banjir dalam sesaat.²⁴

²⁴ IDEP, *Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat*. Edisi Ke-2. (Bali: Yayasan IDEP, 2007), hlm 22.

BAB III

G. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono, Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk menemukan jawaban dalam masalah-masalah, tujuan dan manfaat yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka metode penelitian yang berjudul “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Tamiang” ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif berupa lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan penelitian di tempat terjadinya gejala yang diteliti.²⁵ Pendekatan kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena, peristiwa, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu atau kelompok secara faktual dan akurat mengenai fakta yang diselidiki dan hasilnya dapat di pergunakan untuk mengambil keputusan dimasa mendatang.

Penelitian kualitatif yang akan dilaksanakan ini memiliki ciri-ciri sebagaimana dikemukakan Bogdan dan Biklen yaitu: (a) Latar alamiah sebagai sumber data, (b) peneliti adalah instrumen kunci, (c) penelitian kualitatif lebih mementingkan proses dari pada hasil, (d) peneliti dengan pendekatan kualitatif cenderung menganalisis data secara induktif, (e) makna yang dimiliki pelaku yang mendasari tindakan-tindakan mereka merupakan aspek esensial dalam penelitian kualitatif.²⁶

²⁵ Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 41.

²⁶ Lexy J moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda karya, 2004), hlm. 5.

Sedangkan ciri-ciri utama penelitian kualitatif yang dikemukakan Danim bahwa penelitian kualitatif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka dan walaupun ada angkanya hanya sebagai penunjang serta data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan lain-lain. Ada beberapa pertimbangan peneliti sehingga menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini, yaitu mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Moleong berikut ini.

Pertama, menyesuaikan penelitian kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; *kedua*, ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

H. Informan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lokasi BPBD Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun Alasan pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan beberapa alasan berikut; Belum pernah dilakukan penelitian sejenis dan terdapat permasalahan yang sesuai dengan fokus penelitian ini.

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian sehingga subjek penelitian telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Dalam penelitian kualitatif diperlukan informan penelitian agar setiap informasi di dapat secara detail oleh peneliti.²⁷

²⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 115.

Informan penelitian meliputi tiga macam yaitu (1) informan kunci (key informan), yaitu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Aceh Tamiang, Ir. Razuardi, MT (2) informan utama, yaitu Kepala Bidang pelaksana Syamsul Bahri S.Pd, Kepala bidang kesiapsiagaan pencegahan, Husni SP, Kepala Camat Kejuruan Muda, Syarkawi, S.sos dan Masyarakat Kecamatan Kejuruan Muda (3) informan tambahan, yaitu Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik, Mhd Nur, SE, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Edi Suwanto S, Ag. Dalam menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiono, yang dimaksud dengan purposive sampling adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu.

I. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan keterangan-keterangan suatu hal. Pengertian sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, informasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Menurut Lofland dalam Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan.²⁸ Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua, yaitu:

Data primer, yaitu data yang di peroleh secara langsung oleh peneliti dari lapangan. sumber data penelitian yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala BPBD, kepala bidang, petugas lapangan, serta tokoh masyarakat yang berupa informasi yang terkait dengan peran manajemen penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Aceh Tamiang.

²⁸Moleong, *Metodologi*, hlm. 157.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh sumber data penelitian yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁹Data sekunder penelitian ini diperoleh dari BPS, dokumen kantor BPBD Kabupaten Aceh Tamiang, dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang. Selain dari instansi tersebut data penelitian ini juga diperoleh dari penelitian kepustakaan, studi literatur, website yang berhubungan dengan peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir.

J. Instrument Pengumpul Data

Untuk dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.³⁰ Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Metode ini dipergunakan sebagai salah satu piranti dalam pengumpulan data berdasarkan pengamatan secara langsung manajemen penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Interview (Wawancara)

Interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview)

²⁹M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.82.

³⁰Burhan Bungin, *Ibid*, hlm. 120.

yang memberikan jawaban atau pertanyaan.³¹ Wawancara terbagi atas dua, yaitu:

- 1) Wawancara berstruktur adalah wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- 2) Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaannya. Pedoman wawancara dimaksudkan adalah alat atau instrumen yang digunakan sebagai sarana penunjang dan membantu dalam wawancara secara langsung ke lapangan penulisan dengan menggunakan sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid dan objektif.

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang sejarah berdiri, struktur organisasi, prinsip-prinsip Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir. Wawancara yang dilakukan secara langsung oleh penulis dengan informan yang ditemui secara langsung di Kantor BPBD Kabupaten Aceh Tamiang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data yang tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber data resmi dan tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh

³¹Moleong, *Ibid*, hlm. 5.

lembaga/perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah dokumen yang dikeluarkan oleh individu tidak atas lembaga.³²

K. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu analisis yang pengolahan datanya dibandingkan dengan suatu standar atau kriteria yang telah dibuat peneliti. Menurut Moleong, analisis data ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dalam memperoleh pengakuan terhadap hasil penelitian ini terletak pada keabsahan data penelitian yang telah dikumpulkan. Berpedoman kepada pendapat Lincoln & Guba, untuk mencapai trustworthiness (kebenaran) dipergunakan berbagai teknik, yaitu:

1. Kredibilitas

Kredibilitas identik dengan internal konsistensi yang dibangun sejak pengumpulan dan analisis data melalui tiga kegiatan, yaitu :

- a. Keterikatan yang lama (prolonged engagement) peneliti dengan yang diteliti memiliki konsekuensi memperpanjang waktu yang cukup guna mencapai tujuan yang ditetapkan dalam penelitian-penelitian. Untuk mencapai maksud ini maka kegiatan penelitian dilaksanakan dengan tidak tergesa-gesa.

³²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan Praktik* (jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 245.

- b. Ketekunan pengamatan (Persistent Observation) atau melakukan observasi menetap terhadap fakta-fakta yang muncul di lapangan penelitian.
- c. Melakukan triangulasi (triangulation), yaitu memeriksa informasi yang diperoleh dari beberapa sumber antara data wawancara dengan data pengamatan dan dokumen. Menurut Moloeng, triangulasi ialah teknik pemeriksaan keabsahan data dapat memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh dari penggunaan teknik pengumpulan data.

2. Transferabilitas

Generalisasi dalam penelitian kualitatif tidak mempersyaratkan asumsi-asumsi seperti rata-rata populasi dan rata-rata sampel atau asumsi kurva norma. Transferabilitas memperhatikan kecocokan arti fungsi unsur-unsur yang terkandung dalam fenomena studi dan fenomena lain diluar ruang lingkup studi.

3. Dependabilitas.

Dependabilitas dibangun sejak dari pengumpulan data dan analisis data lapangan serta saat pengkajian data laporan penelitian. Dalam pengembangan bersaing keabsahan data dibangun mulai dari pemilihan kasus dan fokus, melakukan orientasi lapangan dan pengembangan kerangka konseptual.

4. Komfirmabilitas.

Komfirmabilitas dilakukan dengan cara mengkonsultasikan setiap langkah kegiatan kepada pembimbing sejak dari pengembangan desain, refocusing, penentuan konteks dan narasumber, instrumentasi, pengumpulan dan analisis data serta penyajian data penelitian. Beberapa hal yang menjadi pokok diskusi adalah

keabsahan sample/subjek, kesesuaian logika kesimpulan dan data yang tersedia, pemeriksaan terhadap bias peneliti, ketepatan langkah dalam pengumpulan data dan ketepatan kerangka konseptual serta konstruksi yang dibangun berdasarkan data lapangan. Setiap dari tahapan ini merupakan jaminan dalam mengembangkan komfirmabilitas penelitian.

Setelah data dan informasi yang diperlukan terkumpulkan selanjutnya dianalisis dalam rangka menemukan makna temuan. Menurut Moleong, analisis data ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Selanjutnya dikemukakan bahwa analisis data merupakan proses yang terus menerus dilakukan didalam riset observasi partisipan. Data atau informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian akan dianalisis secara kontiniu.

Analisis data dalam penelitian kualitatif bergerak secara induktif yaitu data/fakta dikategorikan menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi melakukan sintesis dan mengembangkan teori bila diperlukan. Setelah data dikumpulkan dari lokasi penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumen maka dilakukan pengelompokan dan pengurangan yang tidak penting. Setelah itu dilakukan analisis penguraian dan penarikan kesimpulan.

Menurut Huberman & Miles, analisis data dikatagorikan kepada tiga tahap proses, yaitu: tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis terjadi sebelum pengumpulan data dalam membuat

rancangan penelitian, pada tahap pengumpulan data dan pelaksanaan analisis awal, serta setelah pengumpulan data sebagai hasil akhir.

a. Reduksi data.

Data yang didapat dalam penelitian akan direduksi, agar tidak terlalu bertumpuk-tumpuk memudahkan dalam mengelompokkan data dan memudahkan dalam menyimpulkannya. Lebih lanjut dijelaskan Miles dan Huberman mendefinisikan reduksi data sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data “mentah/kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Penyajian data merupakan gambaran secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh. Penyajian data-data berupa matriks, grafik, jaringan kerja dan lainnya.

c. Kesimpulan

Data awal yang berwujud kata-kata, tulisan dan tingkah laku sosial oleh para aktor diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara serta studi dokumen. Kesimpulan pada awalnya masih longgar namun kemudian meningkatkan menjadi lebih rinci dan mendalam dengan bertambahnya data dan akhirnya kesimpulan merupakan suatu konfigurasi yang utuh.³³

³³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan Praktik, Ibid*, hlm. 245.

BAB IV
PERAN MANAJEMEN BPBD DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI
KAB ACEH TAMIANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM

L. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Luas Wilayah

Secara garis besar Kabupaten Aceh Tamiang adalah daerah dataran rendah dan perbukitan, yang sangat cocok untuk daerah perkebunan dan persawahan. Hal ini sesuai dengan jenis pekerjaan mayoritas dari penduduk Aceh Tamiang sebagai Petani. Kabupaten Aceh Tamiang terletak di pesisir Pantai Timur kepulauan Sumatera yang membentang dari Utara ke Selatan dengan panjang garis pantai sejauh $\pm 64,66$ KM secara geografis terbentang pada posisi $03^{\circ}.53'18.81''$ - $04^{\circ}.32'56.76''$ LU / NL sampai $97^{\circ}.43'41.51''$ - $98^{\circ}.14'45.41''$ BT/EL mempunyai luas wilayah seluruhnya $1.957.02$ Km² yang terletak di pesisir Timur Pulau Sumatera.

Adapun batas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Serba Jadi dan Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tenggara.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues.
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa.³⁴

³⁴ Sumber: *BPS Kabupaten Aceh Tamiang/4-juli-2018*

2. Jumlah Kecamatan dan Kampung

Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari 12 Kecamatan dan 213 Kampung. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dibawah kabupaten yang tersebar dalam 12 Kecamatan Kabupaten Aceh Tamiang. Jumlah Rumah Tangga/Kepala Keluarga.

Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Aceh Tamiang berjumlah 61.975 KK dengan rata-rata dalam satu rumah tangga dihuni oleh 4 orang anggota keluarga.

Kepadatan Penduduk rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017 adalah 135 orang per kilometer persegi. Daerah yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah Kecamatan Kota Kuala Simpang yaitu 4224 orang perkilometer persegi, sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Sekerak 25 orang per kilometer persegi. Kepadatan penduduk dipengaruhi oleh besarnya wilayah pada masing-masing kecamatan. Kepadatan penduduk dari sektor kesehatan merupakan indikator dalam melihat beberapa kondisi kesehatan yang akan muncul terutama kondisi kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan ketersediaan air minum, air bersih, sistem pembuangan air limbah dan sampah keluarga.³⁵

3. Rasio Beban Tanggungan

Rasio Beban Tanggungan adalah perbandingan antara banyaknya orang yang belum produktif (usia kurang dari 15 tahun) dan tidak produktif lagi (usia 65

³⁵ Sumber: *Profil Kesehatan Aceh Tamiang 2013*

tahun ke atas) dengan banyaknya orang yang termasuk usia produktif (15 – 64 tahun). Saat ini rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 sebesar 58,29 persen.³⁶

4. Rasio JenisKelamin

Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 131.888 jiwa dan perempuan sebanyak 132.532 jiwa. Seks Rasio adalah 99, berarti terdapat 99 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.³⁷

5. Bencana di Kab Aceh Tamiang

Beberapa Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai potensi tinggi terjadinya bencana banjir seperti Kecamatan Bandar Mulia, Bendahara, Karang Baru, Kejuruan Muda, Tamiang Hulu, Kota Kuala Simpang, Tenggulun, Manyak Payed, Rantau, Sekerak dan Seruway.³⁸

Kabupaten Aceh Tamiang sebelum pemekaran adalah bagian dari Kabupaten Aceh Timur yang secara geografis terbentang pada posisi 03° 53 - 04° 32' LU sampai 97° 44'- 98° 18' BT, dengan batas administratif 12 Kecamatan, 27 Kemukiman, 1 kelurahan, 213 Kampung, dan 701 Dusun yang secara keseluruhan mempunyai luas 1.956,72 Km² atau 195.672 Hektar, Kecamatan Tenggulun merupakan yang paling luas yaitu 295,55 Km² atau 29.555 Hektar.

Kabupaten Aceh Tamiang memiliki 12 kecamatan yang terdiri dari 27 mukim dan 213 kampung, merupakan Daerah yang memiliki Sejarah Bencana yang sangat bervariasi seperti Gempa Bumi, Banjir, Kebakaran, Kekeringan dan

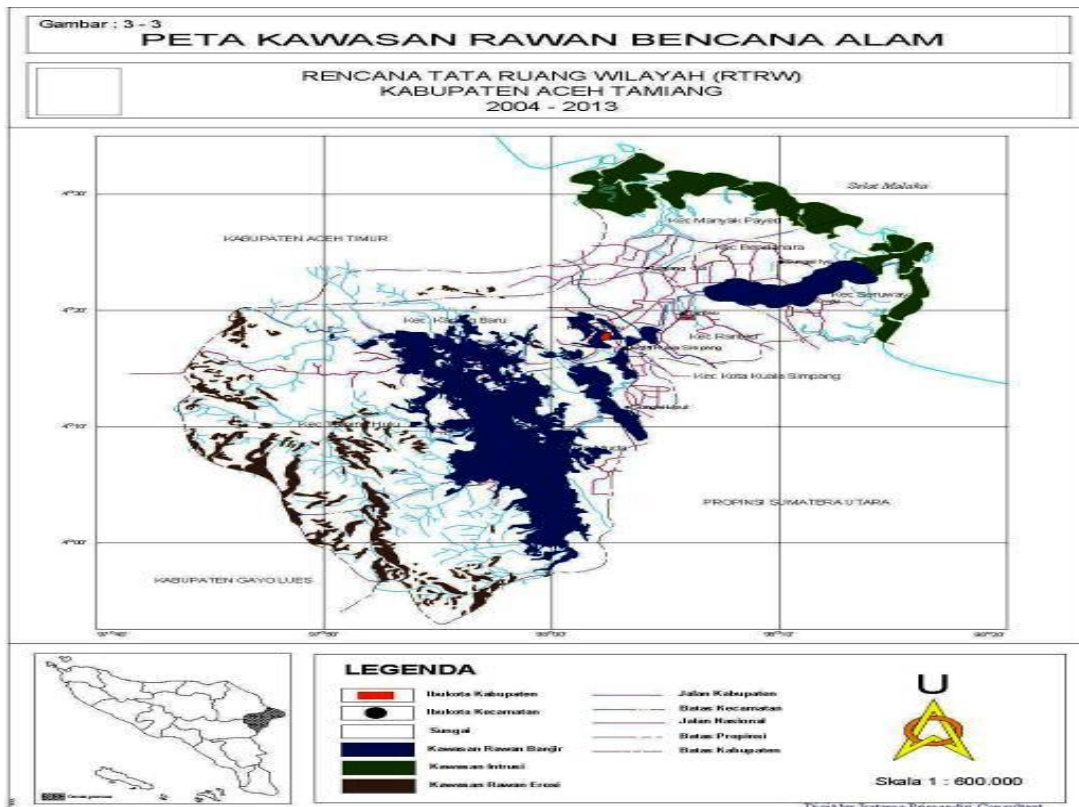
³⁶ Sumber: *Profil Kesehatan Aceh Tamiang 2013*

³⁷ *Ibid*

³⁸ Sumber: *BPBD Kab Aceh Tamiang/ 7-Juli-2018*

Angin Kencang. Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daerah yang rawan terjadinya bencana banjir. Banjir berpotensi terjadi di Aceh Tamiang 1 sampai dengan 2 kali setiap tahunnya pada musim hujan bulan Oktober, November dan Desember.

Gambar 1 Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir



di daerah hulu DAS Krueng Tamiang menyebabkan longsor dan menimbulkan luapan banjir lumpur sehingga terjadi kerusakan terhadap ekosistem Das sungai Tamiang. Akibat longsor pada daerah tangkapan air dan tebing sungai simpang kiri dan simpang kanan kemudian terakumulasi pada aliran sungai utama yaitu sungai Tamiang yang menyebabkan pendangkalan sungai yang sangat intensif dan air menggenangi seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Dampak dari bencana tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2 di bawah ini

Tabel 2 Cakupan Wilayah Banjir Bandang Tahun 2016 Di Kabupaten Aceh Tamiang

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Desa terkena Bencana	Persentase
1	Manyak Payed	36	33	92
2	Bendahara	33	33	100
3	Seruway	24	10	42
4	Rantau	16	16	100
5	Karang Baru	31	31	100
6	Kota Kuala Simpang	5	5	100
7	Kejuruan Muda	15	14	93
8	Tamiang Hulu	9	6	67
9	Sekrak	14	14	100
10	Tenggulun	5	4	80
11	Bandar Pusaka	15	15	100
12	Banda Mulia	10	10	100
TOTAL		213	191	90

Sumber : Laporan Situasi Bencana Banjir Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016

Tabel 3 Situasi Korban Bencana Alam Banjir Di Kabupaten Aceh Tamiang

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah Korban Banjir		Jumlah Pengungsi Hari ini		Jumlah Korban Meninggal Dunia				Jlh Titik Pengungsian	Ket
		KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	Saat Banjir	Dipengungsian	Relawan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Karang Baru	7.613	33.368	6.645	30.737	537	2.214	7	-	1	8	22	Titik
2	Kota Kualasimpang	4.460	20.560	4.261	19.310	599	2.347	2	1	-	3	6	Titik
3	Kejuruan Muda	5.296	29.197	4.369	18.331	3.261	13.742	2	3	-	5	46	Titik
4	Rantau	7.685	33.723	5.406	22.592	461	2.034	-	4	-	4	6	Titik
5	Tamiang Hulu	8.936	17.899	7.149	14.319	-	-	-	-	-	-	-	Titik
6	Manyak Payed	5.865	28.666	4.450	26.415	116	342	1	-	-	1	11	Titik
7	Bendahara	4.873	19.442	1.825	13.000	-	-	1	-	-	1	-	Titik
8	Seruway	5.425	23.793	2.005	10.024	-	-	-	-	-	-	-	Titik
9	Sekerak	1.325	6.140	1.134	5.280	460	2.233	1	-	-	1	14	Titik
10	Tenggulun	3.977	14.728	2.095	9.305	737	3.020	5	-	-	5	7	Titik
11	Bandar Pusaka	2.251	10.098	1.879	8.780	1.628	7.122	-	-	-	-	26	Titik
12	Banda Mulia	2.464	10.859	2.34	9.913	-	-	-	-	-	-	-	Titik
JUMLAH		60,170	248.473	43.561	188.006	7.799	33.054	19	8	1	28	138	Titik

Sumber : Laporan Situasi Bencana Banjir Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016

Bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang selain dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur dan menyebabkan kerugian material, namun juga telah menelan korban jiwa. Banjir terutama terjadi di daerah hilir sungai yang merupakan akibat dari berkurangnya daerah resapan dan rusaknya fungsi lindung di daerah hulu. Banjir dapat terjadi selama atau setelah hujan lebat. Air hujan yang masuk ke dalam sungai, apabila melebihi daya tampung sungai, maka air akan meluap dan mengalir ke tempat-tempat yang rendah. Aktivitas manusia sering pula menimbulkan banjir seperti membuang sampah ke sungai, mendirikan perumahan pada bantaran sungai, penebangan pohon secara liar dan pembangunan perumahan di daerah resapan air. Kawasan rawan bencana banjir yang terdapat di Kabupaten Aceh tamiang seluas kurang lebih 88,855.16 Ha. Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran kawasan banjir di Kabupaten Aceh Tamiang dapat dilihat pada Tabel 3 berikut dibawah ini.

Tabel 4 Sebaran Kawasan Rawan Banjir Di Kabupaten Aceh Tamiang

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Rawan Banjir (Ha)	Persen (%)
1	Banda Mulia	6,012	2.278,99	1.03
2	Bandar Pusaka	21,273	124,81	0.06
3	Bendahara	12,959	6.776,48	3.06
4	Karang Baru	10,379	19.643,27	8.87
5	Kejuruhan Muda	16,530	10.010,26	4.52
6	Kota Kualasimpang	258	550,15	0.25
7	Manyak Payed	21,960	3.078,45	1.39
8	Rantau	7,605	8.719,76	3.94
9	Sekerak	14,081	3.003,73	1.36
10	Seruway	16,712	28.501,54	12.87
11	Tamiang Hulu	47,456	4.272,15	1.93
12	Tenggulun	46,306	1.895,57	0.86
		221,531	88.855,16	40,11

Sumber : Hasil Analisis dan Rencana, Tahun 2016

Adapun Potensi Bencana Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Sejarah kejadian dari tabel 5 adalah;

Tabel 5 Potensi Bencana Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Sejarah kejadian

NO	BAHAYA	KECAMATAN	TAHUN
1	Banjir	12	2003,2004,2005,2006 2007,2008,2009, 2010,2011,2012,2013,2017
2	Kebakaran	7	2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009, 2010,2011,2012,2013,
3	Kekeringan	6	2010,2011,2012,2013,2014

Dari data yang diperoleh dari Dinas Sumber Daya Air Propinsi Aceh berdasarkan data banjir tahun 2006, bahwa di kabupaten Aceh Tamiang terdapat 19 desa yang sangat rawan terhadap banjir. Ke 19 desa tersebut tersebar di 5 kecamatan dan dapat dilihat dalam tabel 6 berikut,

Tabel 6 Daftar desa yang memiliki resiko tinggi terhadap bencana banjir

Kecamatan	Desa	Karakteristik Banjir		
		Luas (Ha)	Tinggi Genangan (m)	Durasi Genangan (Jam)
Kejuruan Muda	Alur Selebu	143	2,00	120
	Kampung Jawa	146,25	2,00	120
	Pangkalan	110,5	2,00	120
	Semadam	117	2,00	120
	Sidodadi	78	2,00	120
	Tanjung Mancang	130	2,00	120
Rantau	Jamur Jelantang	202,5	1,50	72
	Jamur Labu	190	1,50	72
	Alur Cucur	160	1,50	72
	Suka Mulia	180	1,50	72
	Suka Rakyat	176	1,50	72
Karang Baru	Medang Ara	100	2,00	120
	Pahlawan	144,5	2,00	120
Seruway	Tangsi Lama	168	1,50	72
	Sei Kuruk I	42	1,50	72

Tenggulun	Sim pang Kiri	178,75	2,00	120
	Selamat	150	2,00	120
	Tebing Tinggi	143	2,00	120
	Tenggulun	115	2,00	120

Sumber : *Data Seksi Hidrologi, Bidang Sungai Waduk dan Danau, Dinas Sumber Daya Air Propinsi Aceh*

M. Peran Manajemen BPBD Terhadap penanggulangan Banjir di Kab Aceh Tamiang

Sebelum dibentuknya BPBD, pemerintah telah membentuk suatu badan yang khusus menangani masalah bencana dan pengungsi. Badan tersebut adalah Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Bakornas PBP). Meskipun badan tersebut diberi kewenangan untuk menanggulangi bencana dan pengungsi, namun badan ini tidak diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi koordinasi yang sesungguhnya sehingga tidak dapat dengan serta-merta menggerakkan departemen teknis terkait yang punya sumber daya manusia dan dana ketika bencana terjadi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya peraturan yang memberi kekuatan hukum guna memaksa semua unsur untuk menanggulangi bencana.

Selama ini badan penanganan bencana di tingkat nasional hingga ke tingkat kabupaten dalam bentuk satuan pelaksana (satlak) sifatnya hanya koordinatif dalam hal bantuan dan kerjasama dengan semua stakeholder dan pihak luar negeri. Bakornas PB sendiri hanya sebuah sekretariat yang berada di bawah kantor Wakil Presiden.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diusulkan pembentukan semacam Badan Penanggulangan Bencana yang merupakan badan setingkat departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden menggantikan Bakornas PB

yang selama ini ada. Selain di pusat, di daerah pun dibentuk unit pelaksana daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bersifat operasional.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (disingkat BPBD) dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Perspektif ini memberi penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan risiko. Dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana No. 24 Tahun 2007 Pasal 20 dinyatakan bahwa badan penanggulangan bencana daerah mempunyai fungsi: 1) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; 2) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Dalam rangka implementasi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki tanggal 15 Agustus 2005, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh khususnya pasal 10 dan pasal 100, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu pasal 18, pasal 19 dan pasal 25, serta didukung oleh Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Pemerintah Aceh telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA). Sedangkan seluruh kabupaten/kota yang ada dalam wilayah Aceh telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (BPBD Kabupaten/Kota). Demikian juga halnya pada tingkat Gampong masyarakat mulai menyadari

pentingnya dibentuk Gampong siaga bencana. Badan Penanggulangan Daerah terdiri dari unsur:

1. Unsur Pengarah penanggulangan bencana, fungsinya yakni:
 - a. Unsur pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan atau petunjuk dalam menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala unsur pelaksana.
 - b. Dalam melaksanakan tugas pokok, unsur pengarah penyelenggaraan fungsi pengarahan dalam kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Unsur Pelaksana penanggulangan bencana, fungsinya yakni:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana daerah;

Wawancara yang peneliti lakukan kepada kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab Aceh Tamiang³⁹ perihal peran BPBD dalam penanggulangan banjir menghasilkan beberapa poin penting, diantaranya:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.

³⁹ Wawancara dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Aceh Tamiang, Ir. Razuardi, pada tanggal 28-Juni-2018 di kantor BPBD Kab Aceh Tamiang

2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan Merujuk pada Permendagri No.46 Tahun 2008, Kepres No.41 Tahun 2007, Peraturan Kepala BNPB dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas penanggulangan bencana yang diatur dalam tiga divisi utama yaitu kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.⁴⁰

Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ada beberapa upaya dalam menanggulangi bencana⁴¹, antara lain:

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Aceh Tamiang, Ir. Razuardi, pada tanggal 28-Juni-2018 di kantor BPBD Kab Aceh Tamiang

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana

1. Kegiatan pencegahan bencana yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancamanbencana.
2. Kesiapsiagaan yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.
3. Peringatan dini yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan segera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yangberwenang.
4. Mitigasi yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancamanbencana.
5. Tanggap darurat yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Sasaran utama dari tahap tanggap darurat adalah penyelamatan dan pertolongan kemanusiaan. Dalam tahap tanggap darurat ini, diupayakan pula penyelesaian tempat penampungan sementara yang layak, serta pengaturan dan pembagian logistik yang cepat dan tepat sasaran kepada seluruh korban bencana.
6. Rehabilitasi yaitu perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi. Sasaran utama dari tahap rehabilitasi ini adalah untuk memperbaiki pelayanan publik hingga pada

tingkat yang memadai. Dalam tahap rehabilitasi ini, juga diupayakan penyelesaian berbagai permasalahan yang terkait dengan aspek psikologis melalui penanganan trauma korban bencana.

7. Rekonstruksi yaitu pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat.

Dari beberapa upaya diatas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Hal serupa juga diutarakan oleh Kepala bidang kesiapsiagaan pencegahan, BPBD Kab Aceh Tamiang, Husni SP, beliau menuturkan:

“Dalam penanggulangan banjir BPBD berperan secara bertahap, yaitu pencegahan sebelum banjir (*prevention*), penanganan saat banjir (*response/intervention*), dan pemulihan setelah banjir (*recovery*). Tahap-tahap ini dilakukan dalam suatu siklus kegiatan penanggulangan banjir yang berkelanjutan.”⁴²

Berikut adalah tabel penjelasan lengkap dari Kepala BPBD Kab Aceh Tamiang tentang kegiatan dalam siklus Penanggulangan Banjir:

⁴² Wawancara dengan Kepala bidang kesiapsiagaan pencegahan, BPBD Kab Aceh Tamiang, Husni SP, pada tanggal 28-Juni-2018 di kantor BPBD Kab Aceh Tamiang.

SIKLUS	KEGIATAN
PENCEGAHAN(Prevention)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melarang penebangan pohon 2. Melarang penambangan batu di daerah curam
PENANGANAN (Intervention / Response)	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemberitahuan dan penyebaran Informasi prakiraan Banjir 4. Reaksi Cepat Bantuan Penanganan Darurat Banjir 5. Perlawanan Terhadap Banjir
PEMULIHAN (Recovery)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan segera kebutuhan hidup sehari-hari dan perbaikan sarana dan prasarana 2. Pembersihan dan rekonstruksi pascabanjir 3. Rehabilitasi dan pemulihan kondisi fisik dan Non-fisik 4. Penilaian kerusakan / kerugian dan asuransi bencana banjir 5. Kajian penyebab terjadinya bencana banjir

Pencegahan banjir dilakukan secara menyeluruh, berupa kegiatan fisik seperti pembangunan pengendali banjir di wilayah sungai (instream) sampai wilayah dataran banjir (off stream), dan kegiatan non-fisik seperti pengelolaan tata guna lahan sampai sistem peringatan dini banjir. Setelah dilakukan pencegahan, dirancang pula suatu tindakan penanganan saat banjir terjadi. Tindakan penanganan bencana banjir, antara lain pemberitahuan dan penyebaran informasi tentang prakiraan banjir, tanggap darurat, bantuan peralatan perlengkapan logistic penanganan banjir, dan perlawanan terhadap banjir.

Pemulihan setelah banjir dilakukan sesegera mungkin, untuk mempercepat perbaikan agar kondisi umum berjalan sebagaimana biasanya. Tindakan

pemulihan dilakukan mulai dari bantuan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, perbaikan sarana dan prasarana, rehabilitasi dan adaptasi kondisi fisik dan non fisik, penilaian kerugian materil dan non materil, asuransi bencana banjir, dan pengkajian cepat penyebab banjir untuk masukan dalam tindakan pencegahan.

Pada hakekatnya pengendalian banjir merupakan suatu proses yang kompleks, dimana dimensi rekayasanya melibatkan banyak disiplin ilmu. Selain itu, keberhasilan program pengendalian banjir juga tergantung dari aspek lain seperti aspek social, ekonomi, lingkungan, institusi, kelembagaan, hukum, dan lainnya.

Mengenai peran BPBD dilapangan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Aceh Tamiang, Ir. Razuardi mengatakan:

“Apabila ada laporan kejadian bencana, BPBD langsung menurunkan personil untuk mengecek dampak terjadinya bencana tersebut, menghitung kerusakan dan kerugian yang diakibatkan bencana tersebut, lalu memberikan bantuan berupa kebutuhan dasar bagi para korban. Selanjutnya melakukan koordinasi ke instansi terkait ataupun sosialisasi seputar apa yg harus dilakukan oleh korban. Dan yang terakhir membuat program kerja.”⁴³

Hal tersebut di iyaikan oleh Kepala CamatKejuruan Muda, Syarkawi, beliau mengatakan:

⁴³ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Aceh Tamiang, Ir. Razuardi, pada tanggal 28-Juni-2018 di kantor BPBD Kab Aceh Tamiang

“pada saat wilayah kami terkena banjir, BPBD melakukan peran yang terbilang cukup cepat dan sangat membantu.”⁴⁴

N. Hambatan BPBD dalam Penanggulangan Banjir di Kab Aceh Tamiang

1. Kurangnya koordinasi

Salah satu misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana.

Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik, Mhd Nur, SE, mengatakan:

“Yang menjadi kendala dalam pengkoordinasian adalah kendala yang disebabkan tanggung jawab unit satuan kerja kurang jelas, kurang adanya koordinasi yang baik antara unsur-unsur pengarah, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sumatera Utara, Dinas Sosial setempat, Bupati Aceh Tamiang, TNI, POLRI, Dinas Bina Marga Kab Aceh Tamiang, dan lain sebagainya. Kurangnya koordinasi ini menyebabkan lambatnya pemberian bantuan bencana karena antar instansi kurang dapat bekerja sama dengan efektif. Sehingga apabila adanya kejadian bencana banjir di Kab Aceh Tamiang maka instansi yang terkait harus membuat surat terlebih dahulu kepada Dinas Sosial agar bantuan segera diturunkan ke lokasi.”⁴⁵

⁴⁴Hasil wawancara dengan Camat Kejuruan Muda, Syarkawi, pada tanggal 7-Juli-2018.

⁴⁵Wawancara dengan Kepala Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik, Mhd Nur, SE,, pada tanggal 28-Juni-2018 di kantor BPBD Kab Aceh Tamiang.

2. Kurang tersosialisasinya tata cara pemberian bantuan

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pemberian bantuan sehingga sering kali menimbulkan prasangka buruk. Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik, Mhd Nur, SE mengatakan:

“Masyarakat korban banjir umumnya menginginkan bantuan di berikan secara langsung. Hambatan yang lain juga berasal dari masyarakat yang memberi bantuan. Kurang kepercayaan masyarakat yang memberi bantuan logistik tersebut kepada instansi atau dinas yang terkait di dalamnya, sedangkan sistem dan prosedur tersebut harus dikumpul dan dicatat terlebih dahulu. Setelah tercatat dan terkumpul, maka bantuan tersebut sudah boleh diberikan kepada korban bencana banjir.”⁴⁶

⁴⁶Wawancara dengan Kepala Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik, Mhd Nur, SE,, pada tanggal 28-Juni-2018 di kantor BPBD Kab Aceh Tamiang.

3. Kurangnya sarana dan prasarana

Sumber daya lainnya yang tidak kalah penting adalah sarana dan prasarana. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik, Mhd Nur, SE,

“kurangnya sarana dan prasarana, meliputi dua hal yaitu sarana dan prasarana umum dan khusus. Sarana dan prasarana umum yang meliputi peralatan peringatan dini, posko bencana, kendaraan operasional, peta rawan bencana, rute dan lokasi evakuasi pengungsi, prosedur tetap penanggulangan bencana, kebutuhan logistik, pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan, tenda darurat, sarana air bersih dan sanitasi, dan peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana. Sarana dan prasarana khusus yang meliputi media center, juru bicara resmi/penghubung, rumah sakit lapangan, *trauma center*, alat transportasi daerah, dan lokasi kuburan massal bagi korban yang meninggal”.⁴⁷

4. Kurangnya SDM

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Aceh Tamiang juga sangat kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kesesuaian keahlian dan pendidikan untuk pengimplementasian penanggulangan bencana juga menjadi masalah tersendiri. Indikatornya adalah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagian besar adalah pindahan dari instansi lain yang belum tentu ada

⁴⁷Wawancara dengan Kepala Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik, Mhd Nur, SE,, pada tanggal 28-Juni-2018 di kantor BPBD Kab Aceh Tamiang.

kaitannya dengan penanganan bencana. Di samping itu, mereka juga tidak mendapatkan pelatihan dan penguatan kelembagaan serta pendampingan dan pembinaan dari masing-masing Kepala Bidang di. Dari hasil wawancara ini, peneliti menyimpulkan bahwa pelatihan dan pembobotan perlu dilakukan terhadap semua aparatur di BPBD sehingga mereka memahami tupoksi masing-masing dan tidak menghambat pelaksanaan tugas yang diemban.

O. Pandangan Islam Terhadap BPBD dalam Menanggulangi Banjir di Kab Aceh Tamiang

Alquran merupakan sumber intelektual dan spiritualitas Islam yang merupakan basis dan sumber inspirasi pandangan Muslim untuk pengetahuan spiritualitas, tetapi juga untuk semua jenis pengetahuan sehingga terjadi keterpaduan semua jenis pengetahuan. Meskipun demikian, Alquran bukan kitab sains, tetapi Alquran memberikan tentang prinsip-prinsip sains yang selalu dikaitkan dengan pengetahuan metafisik dan spiritual.⁴⁸

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam

⁴⁸ Endang Saifudin Anshari, *Wawasan Islam, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya*, (Bandung: ITB, 1983), hlm.9.

antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.⁴⁹

Sebagian orang beranggapan bahwa bencana semata-mata karena takdir dari Allah. Namun, sesungguhnya sunnatullah itu berlangsung ketika manusia lupa akan tugas-tugas kekhalfahan di atas bumi. Bencana alam adalah konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami (gunung meletus gempa bumi, tanah longsor) dan aktivitas manusia. Factor ketidakberdayaan manusia, akibat kurang baiknya manajemen keadaan darurat, sehingga menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan dan struktural, bahkan kematian. QS. Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Artinya: *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*⁵⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah ingin mengingatkan kepada manusia bahwa bencana yang terjadi di daratan di lautan merupakan akibat dari ulah manusia. Hal ini menunjukkan bahwa bencana bukan inisiatif dari Allah, seperti menghukum, menguji, maupun memperingatkan umat manusia. Banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa manusia biang dari bencana yang terjadi, sebagai contoh dengan pengundulan hutan yang berlebihan, perusakan laut dengan mengeksploitasi sumber daya yang ada di lautan yang semuanya untuk

⁴⁹Wahyu, MS, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 135.

⁵⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, (Diponegoro, Bandung, 2010). hlm.234

memenuhi kepuasan sesaat manusia. Hal ini juga tidak dengan dibarengi upaya untuk menyeimbangkan alam agar ekosistem yang ada berjalan dengan dinamis.

Alquran menjelaskan secara teologis, bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam merupakan tindakan kekuasaan Tuhan. Sebagaimana yang disabdakan dalam Surat Al-Hadid ayat 22-23,

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۚ ۲۲ لَّكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۚ ۲۳

Artinya: *Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.*⁵¹

Islam mengajarkan sikap proaktif daripada hanya reaktif. Alih-alih menunggu bencana terjadi, penekanan diberikan pada pemikiran bagaimana nanti kalau bencana terjadi. Dengan demikian kita dapat mengambil langkah-langkah nyata sebelum sebuah bencana terjadi. Kalau bencana kita anggap sebagai fenomena alam atau fisik belaka, maka yang terjadi adalah kondisi yang tidak siap untuk menghadapi eksese atau akibat dari bencana seperti gempa bumi atau tsunami sebelum itu terjadi. Pembandingnya, dengan meletakkan bencana sebagai fenomena sosial maka tindakan preventif dapat dilakukan.

Kesadaran ini perlu dibangun dan diberdayakan, sehingga kelak masyarakat tidak lagi hanya menjadi korban bencana tetapi lebih menjadi sumber

⁵¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Ibid*, hlm.121

daya penolong bagi dirinya sendiri dan lingkungan dalam keadaan bencana. Kesadaran masyarakat yang terbangun merupakan kesadaran sosial yang meliputi aspek sosial bencana yaitu sistem peringatan dini, antisipasi bencana dan respon saat terjadi bencana, serta kemampuan penanganan pasca bencana. Kesadaran ini merupakan modal sosial untuk membangun budaya mitigasi di dalam kehidupan setiap elemen masyarakat baik yang terkena imbas bencana ataupun tidak. Langkah perubahan pertama yang diperlukan dalam masyarakat adalah adanya transformasi paradigma dari paradigma bantuan/tanggap darurat ke paradigma mitigasi.⁵²

Penanganan pasca bencana memang juga harus diupayakan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi tidak hanya segala sesuatu yang sifatnya fisik, tetapi juga menyangkut hal-hal yang bersifat nonfisik. Hal tersebut karena yang hilang bukan hanya bangunan fisik yang kasat mata, tetapi bangunan mental termasuk fondasi keimanan juga banyak yang runtuh.⁵³

Secara ideologis, penanganan bencana muncul dari keyakinan bahwa hidup manusia pada hakekatnya adalah berharga. Ditematkannya hidup dan kehidupan sebagai hak dasar setiap manusia mempunyai implikasi bahwa semua langkah harus diambil demi mencegah atau meringankan penderitaan manusia baik itu diakibatkan oleh konflik maupun bencana. Berpasangan dengan hak tersebut adalah adanya tanggungjawab pihak lain untuk mengambil langkah- langkah yang mencegah dan meringankan penderitaan semacam itu.

⁵² Mitigasi adalah upaya pengurangan bencana, yang dimaksudkan untuk mengurangi korban (baik materi maupun manusia).

⁵³ Syarif Hade Masyah, *Lewati Musibah Raih Kebahagiaan: Mengubah Bencana Menjadi Kekuatan* (Jakarta: Hikmah, 2007), hlm 148.

Tersirat didalamnya, apabila pihak tersebut tidak dapat memenuhinya, maka mereka bertanggungjawab untuk tidak menghambat, menghalangi atau menggagalkan pihak- pihak lain yang beritikad untuk menyediakannya. Prinsip inilah yang menjadi salah satu pijakan tindakan kemanusiaan.⁵⁴ Pola pikir lain adalah dengan kesadaran yang akan membuat kita lebih memberikan perhatian ke dalam diri kita sendiri (manusia) ketimbang ke luar (alam). Point ini memberikan kita untuk berfikir bahwa bencana bukan sebagai sebuah kekuatan luar yang menimpa sebuah komunitas, tetapi sebagai manifestasi dari ketidaksiagaan dan kurang-waspadaan komunitas tersebut terhadap kekuatan luar yang destruktif seperti bencana. Dengan demikian otokritik menjadi sangat relevan dalam hal ini, karena janaan-janaan ancaman terbesar itu ada dalam manusia itu sendiri.

Apa yang telah dilakukan BPBD di Kab Aceh tamiang merupakan manifestasi terhadap nilai-nilai luhur kemanusiaan yang oleh Islam sudah tertera dalam QS Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَانْفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*⁵⁵

Selain itu Islam sudah mencontohkan bagaimana seharusnya manusia menyikapi bencana pada masa khulafa al Rasyidin. Sudah selayaknya manusia

⁵⁴ Pujiono (ed), *Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimum dalam Respons Bencana*, Grasindo, 2005: *Kode Perilaku Untuk Gerakan Internasional Palng Merah dan Bulan Sabit Merah dan Organisasi-Organisasi Non-Pemerintah (ORNOP) dalam Bantuan Response Bencana*

⁵⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Ibid*, hlm.65

mengambil peran sentral dalam upaya menghindarkan manusia lain dari dampak bencana alam atau meminimalisirnya. Sejak sebelum terjadinya bencana alam, ketika masa tanggap darurat, hingga masa pemulihan dan kehidupan kembali normal. Sebagaimana yang dicontohkan oleh khalifah Umar bin Khattab pada saat daerah Hijaz benar-benar dilanda bencana pada akhir tahun ke 18 H.

BAB V

PENUTUP

P. Kesimpulan

Setelah menyajikan, menguraikan serta mengemukakan penelitian tentang peran BPBD dalam penanggulangan banjir di Kab Aceh Tamiang, peneliti menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan/atau manusia, yang mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerugian harta benda, kerusakan sarana atau prasarana, lingkungan, utilitas umum, hilangnya sumber-sumber kehidupan, serta hilangnya akses terhadap sumber kehidupan. Secara umum penyebab terjadinya bencana banjir adalah karena tingginya curah hujan sehingga saluran atau sungai tidak mampu menampung debit air yang dihasilkan hujan tersebut. Peran BPBD dalam penanggulangan banjir ialah melakukan pencegahan sebelum banjir (*prevention*), penanganan saat banjir (*response/intervention*), dan pemulihan setelah banjir (*recovery*).
2. Dalam penanggulangan bencana banjir, ada beberapa hambatan yang dialami BPBD kab Aceh Tamiang diantaranya: kurangnya koordinasi, kurang tersosialisasinya tata cara pemberian bantuan, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya SDM.
3. Dalam penanggulangan bencana alam, Islam mengajarkan sikap proaktif daripada hanya reaktif. Alih-alih menunggu bencana terjadi, penekanan

diberikan pada pemikiran bagaimana nanti kalau bencana terjadi. Dengan demikian kita dapat mengambil langkah-langkah nyata sebelum sebuah bencana terjadi. Di dalam Islam sendiri diajarkan untuk saling tolong menolong antara manusia dengan manusia lainnya. Hal ini sama seperti apa yang diterapkan oleh BPBD Kab Aceh Tamiang.

Q. Saran-saran

1. Diharapkan kepada umat Muslim pada umumnya dan kepada para peminat kajian bencana alam, khususnya yang berada di Indonesia untuk lebih komprehensif dalam mempelajari dan mengkaji lalu menerapkan pembahasan tersebut.
2. Kepada para peneliti yang hendak meneliti tentang peran BPBD agar benar-benar teliti dalam menempatkan pembahasannya.
3. Dan yang terakhir untuk kesempurnaan penelitian skripsi ini kiranya bagi para pembaca untuk memberikan kritik dan saran seputar isi yang telah disajikan.

DAFTAR PUSTAKA

AnshariEndang Saifudin, *Wawasan Islam, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya*, Bandung: ITB, 1983

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Bungin M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2008.

Darma, Setyawan, Salam. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2010

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

<http://www.bnppb.go.id/page/read/1/sejarah> diakses pada 17 Juni 2018

IDEP, *Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat*. Edisi Ke-2. Bali: Yayasan IDEP, 2007

IyongDS, *Prosedur Tanggap Darurat Bencana*, Edisi I, Jakarta: PMI, 2007

Kodoatie, Robert J. Dan Sugiyanto, *Banjir*, Yogyakarta: Pustaka Belajar 2002

MaarifSyamsul, *Bencana dan Penanggulangannya Tinjauan dari Aspek Sosiologis*.

Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana 2010, 1 (4),

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

PancawatiHeni, *Manajemen Bencana (Disaster Managemen)*, (Purwokerto: KOMPLEET 2006), Materi Seminar

Pujiono (ed), *Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimum dalam Respons Bencana*, Grasindo, 2005: Kode Perilaku Untuk Gerakan Internasional Palng Merah dan Bulan Sabit Merah dan Organisasi-Organisasi Non-Pemerintah (ORNOP) dalam Bantuan Response Bencana

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2010 , Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang

Rakhmat,Jalaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung:Remaja Rosydakarya, 1991.

Samsudin, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Pustaka,Setia,2006.

Soekartawi, *Pengantar Manajemen*. Jakarta: RajagrafindoPustaka. 2009

SudarwanDanim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta,2006.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Syarif Hade Masyah, *Lewati Musibah Raih Kebahagiaan: Mengubah Bencana Menjadi Kekuatan*, Jakarta: Hikmah, 2007

Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana

Wahyu, MS, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986